

# BAB I

## PENDAHULUAN

**R**encana Kerja Penanggulangan Bencana (Renja) merupakan Rencana tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Penanggulangan Bencana 2013-2018 yaitu :

Rencana Kerja Penanggulangan Bencana (Renja) merupakan Rencana tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Penanggulangan Bencana 2013-2018 yaitu :

### **“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Tangguh Bencana”**

Pengertian secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya** : merupakan makna upaya dan peran BPBD dalam mewujudkan Penanggulangan Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif, terpadu dan akuntabel.
2. **Tangguh Bencana** : terkandung makna bahwa Kabupaten Probolinggo melalui BPBD dalam mengatasi bencana daerah agar masyarakat terdampak bencana mempunyai daya hindar, daya adaptasi, daya tolak dan daya lenting.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dapat ditetapkan *Misi BPBD Kabupaten Probolinggo* sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kapasitas aparat dan masyarakat menghadapi ancaman bencana**

Peran Aktif Masyarakat lewat kerja bakti dalam kegiatan Aktivasi Masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan bahaya ancaman bencana yang akan, saat dan panca bencana. Sehingga masyarakat mempunyai daya hindar, daya adaptasi, daya tolak dan daya lenting maka desa tangguh bencana dapat benar-benar terealisasi dan perlu koordinasi dengan Dinas terkait.

2. **Menurunkan Resiko Ancaman Bencana.**

BPBD harus mampu dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara luas untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu menjaga alam dengan baik agar apabila terjadi bencana dapat mengurangi resiko bencana dan melakukan koordinasi antar dinas terkait demiantisipasi kebencanaan yang diprediksi lewat ramalan cuaca terupdate dari website BMKG

Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan *standar pelayanan minimum (SPM) Penanggulangan Bencana* mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara.

Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Bencana (Renja PB) tahun 2018 ini telah melalui tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat dan setelah bencana sebagai output dari proses manajemen diatas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo sesuai Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahun 2016.

Selain Perubahan Iklim (Climate Change) yang mengglobal yang akhir dekade ini akibat ulah manusia terhadap alam sekitarnya yang tidak dapat dihindari dampaknya saat bencana alam itu terjadi diantaranya Air Rob dengan Abrasi air lautnya, Angin Puting Beliung, Banjir bandang, Tanah Longsor, Erupsi Gunungapi serta Krisis air bersih/Kekeringan saat musim kemarau, juga adanya perubahan fisik sosial masyarakat yang sangat besar menyisakan masalah yang sangat kompleks yaitu pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal yang aman terdampak bencana alam walaupun berada di wilayah daerah rawan bencana sesuai Peta Rawan Bencana Kabupaten probolinggo Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Visi yang berdasarkan pada falsafah Manajemen Penanggulangan Bencana ingin mewujudkan masyarakat mempunyai daya hindar, daya adaptasi, daya daya tolak dan daya lenting melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo tahun 2018, Rencana kerja Perubahan ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo di mana tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 Kabupaten Probolinggo.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

### **1.1. LATAR BELAKANG**

*Rancangan Rencana Kerja (Renja)* merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sbb:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42)
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
15. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Probolinggo;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
19. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Nomor : 54 Tahun 2013 tentang Renstra Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 360/ 883/ 426.32/ 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja BPBD (Renja) tahun 2018 ini disusun dengan maksud dan tujuan Rancangan Rencana Kerja tahun 2018 ini adalah rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo sebagai upaya mencari dan merumuskan Isu strategis, dikaitkan dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Probolinggo yang telah dijabarkan dalam Rencana Setrategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013-2018 dan diharapkan sudah dapat menyerap sebagian besar dari program-program yang direncanakan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 juga berupaya untuk mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo secara umum

1. Sebagai Penjabaran atas implementasi dari visi dan misi,
2. Sebagai motivasi untuk mewujudkan peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
- 2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

##### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebelum disusunnya pelaksanaan Renja SKPD perlu adanya suatu konsep skenario penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi yang ada, serta pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Probolinggo.

Dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kerja yang telah menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun 2018 dengan 4 (empat) indikator program dan 2 (dua) sasaran kerja.



Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kerja sasaran yaitu ***Rasio Pengurangan Resiko Bencana pada Kawasan Rawan Bencana***. Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
2. Program Kedaruratan Dan Logistik
3. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi



Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kerja sasaran yaitu : ***Persentase Penanganan Bencana Sesuai SOP***. Sasaran strategi ini dilaksanakan melalui 1 ( satu ) kegiatan yaitu ***Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPBD Kabupaten Probolinggo yaitu :

1. Persentase tertib administrasi perkantoran,
2. Persentase tersedianya sarpras pencegahan dini dan penanggulangan bencana.
3. Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik,

Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
- 2) Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
- 3) Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif , terkoordinir dan /terpadu;
- 4) Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.





## 2.2. ANALISIS KERJA PELAYANAN SKPD

**TABEL 21**  
**PENCAPAIAN KERJA PELAYANAN SKPD**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		standar nasional	(PP-6/08)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016. (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>IKU PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>											
	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	% koordinasi litbang yang inovatif		-	0%	0%	30%	35%	0%	0%	30%	35%	
5	% penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd		-	72.50%	75%	77.50%	80%	72.50%	75%	77.50%	80%	

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good government* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kab. Probolinggo telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, diantaranya :

1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat dusun,
2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada,
3. Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

#### ➤ **Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :**

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
- b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
- c. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Probolinggo;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;

- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
- i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

## 2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap darurat dan logistik sebagai berikut :

- a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
- g. Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana

## 3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
- c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- d. Koordinasi pinalainkerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
- e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

➤ **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :**

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
4. Menghargai budaya lokal,
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

➤ **Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**

1. Kondisi Geografis Kabupaten Probolinggo;
2. Keterbatasan dana;
3. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

➤ **Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**

1. Dukungan undang-undang,
2. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana,
3. Dukungan pimpinan.

➤ **Formulasi isu-isu penting**

1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil,
2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana,
3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana,
4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana,
5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review yang dilakukan terhadap rancangan awal RKPD adalah melakukan proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil dari perbandingan tersebut adalah menganalisis kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam prioritas Penanganan bencana meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ingin dicapai :
  - a. Tertib Administrasi Perkantoran,
  - b. Pengembangan Sistem Pelaporan Kerja Aparatur dan Keuangan.
2. Program Pencegahan Dini yang ingin dicapai :
  - a. Tersedianya data yang akurat dan valid untuk mempercepat kegiatan evakuasi jika terjadi bencana dan kegiatan evaluasi pasca bencana,
  - b. Akan lebih cepat menginformasikan kemungkinan akan terjadinya bencana,
  - c. Pelaksanaan Evakuasi korban bencana berjalan lancar dan cepat,
  - d. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan benar dalam penanggulangan bencana,
  - e. Peningkatan ketrampilan relawan Penanggulangan Bencana,
  - f. Peningkatan SDM TRC dalam melakukan pengkajian secara cepat, tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu,
  - g. Meningkatkan upaya-upaya Penanggulangan Bencana,
  - h. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana dan tersedianya akses pendukung komunikasi

**Tabel 2.2**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017**  
**Kabupaten Probolinggo**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>782.100,000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>909.205.000</b>	
	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	BPBD Kab. Probolinggo	8 Tenaga Honorer	100%	137.600.000	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	BPBD Kab. Probolinggo	8 Tenaga Honorer	97%	145.600.000	
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	BPBD Kab. Probolinggo	14 Orang Pengelola Keuangan dan Asset	100%	46,700,000	Penyediaan jasa Administrasi kepegawaian	BPBD Kab. Probolinggo	14 Orang Pengelola Keuangan dan Asset	100%	46,700,000	
	Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Kegiatan Rakomas Kebencanaan	100%	312.310.000	Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Kegiatan Rakomas Kebencanaan	99%	312.165.245	
	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	BPBD Kab. Probolinggo	Paket Penyediaan Jasa Telepon, Internet, Listrik dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100%	285.490.000	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	BPBD Kab. Probolinggo	4 Paket Penyediaan Jasa Telepon, Internet, Listrik dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	86%	245.351.932	

<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>					<b>461.835.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>458.151.000</b>
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	BPBD Kabupaten Probolinggo	1 Paket Jasa Service dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	354.410,000	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	BPBD Kabupaten Probolinggo	1 Paket Jasa Service dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	99%	353.621,000
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	BPBD Kabupaten Probolinggo	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	107.425,000	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	BPBD Kabupaten Probolinggo	2 Paket Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	98%	104.530,000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>30.000,000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>12,288,000</b>
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	BPBD Kabupaten Probolinggo	Pengembangan kualitas SDA	100%	30.000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	BPBD Kabupaten Probolinggo	1 paket pelatihan Sumber Daya Aparatur BPBD	99%	29.846.017



<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>					<b>61.925,000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>					<b>78,910,000</b>
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPBD Kab. Probolinggo	1 Tenaga Ahli Akuntansi	100%	31.700,000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPBD Kab. Probolinggo	1 Tenaga Ahli Akuntansi	100%	31.700,000	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	BPBD Kab. Probolinggo	Penyusunan Rencana Program	100%	17.000,000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	BPBD Kab. Probolinggo	1 Dokumen Perencana dan Laporan Kinerja	99%	16.975,000	
	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Laporan BMD dan Laporan Persediaan	100%	13.225,000	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Laporan BMD dan Laporan Persediaan	99%	13.202,000	
<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>					<b>1.365.301,000</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>					<b>1,096,973,700</b>
	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	Sarana Publikasi Informasi Daerah Rawan Bencana	100%	131.235,000	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Publikasi informasi Daerah Rawan Bencana	98%	128.027.744,00	
	Aktivasi	BPBD Kab.	Pelaksanaan	100%	95.845,000	Aktivasi Relawan	BPBD Kab.	8 Kali Pelaksanaan	99%	95.698.250,00	

Relawan BPBD	Probolinggo	Aktivitas Relawan				BPBD	Probolinggo	Aktivasi Relawan			
Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	BPBD Kab. Probolinggo	5 Kali Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	100%	84.925,000		Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	BPBD Kab. Probolinggo	5 Kali Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	100%	84.925,000,00	
Pengembangan Informasi Pencegahan Dini	BPBD Kab. Probolinggo	Penyebaran Informasi Dini Secara Elektronik	100%	233.110,000		Pengembangan Informasi Pencegahan Dini	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket Pengembangan Informasi Pencegahan Dini	98%	227.848.945,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kab. Probolinggo	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	68.500,000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kab. Probolinggo	3 Kali Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	68.484,000,00	
Penyusunan Rencana Kontinjensi	BPBD Kab. Probolinggo	Penyusunan Rencana Kontinjensi Tanah Longsor	100%	213.306,000		Penyusunan Rencana Kontinjensi	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket dokumen renkon Tanah longsor	99%	210.906.000,00	
Gelar Relawan	BPBD Kab. Probolinggo	1 Kali Pelaksanaan Gelar Relawan Penanggulangan Bencana	100%	410.475,000		Gelar Relawan	BPBD Kab. Probolinggo	1 Kali Pelaksanaan Gelar Relawan Penanggulangan Bencana	96%	391.320.000,00	
Penunjang Kegiatan Apel Siaga Kebencanaan	BPBD Kab. Probolinggo	2 kali pelaksanaan apel Siaga	100%	127.905.,000		Pelaksanaan Apel Siaga	BPBD Kab. Probolinggo	2 kali pelaksanaan apel Siaga	99%	125.631.200,00	
<b>Program</b>						<b>Program</b>		<b>Program</b>			

<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>					<b>14.246.620,000</b>	<b>pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>		<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>		<b>14.053.695.400</b>	
	Aktivasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat	Kabupaten Probolinggo	Terlaksananya Kerja Bhakti akibat Pasca Bencana Bencana	100%	78.930,000	Terlaksananya Kerja Bhakti akibat Pasca Bencana Bencana	Kabupaten Probolinggo	2 kali pelaksanaan Kerja bakti Pasca Bencana Bencana	100%	78.930,000	
	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan	BPBD Kab. Probolinggo	Terbangunnya Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih	100%	167.690.000	Pembuatan Sumur Bor di Wilayah bencana kekeringan	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket Rehabilitasi jaringan air bersih	99%	167.028.500	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bersumber dari BNPB	BPBD Kab. Probolinggo	Terbangunan daerah daerah yang terdampak Pasca Bencana	100%	14.000.000,000	Terbangunan daerah daerah yang terdampak Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Rehabilitasi tebing sungai	98%	13.807.736.900	
<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>					<b>1.041.175,000</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>		<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>		<b>1.028.690.501</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana	100%	78.760,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	BPBD Kab. Probolinggo	1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana	100%	77.960.000,	

	Penanganan Siaga darurat bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran angin putting beliung)	BPBD Kab. Probolinggo	Penanganan Operasional Siaga Darurat	100%	221.635.000	Penanganan Siaga darurat bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran angin putting beliung)	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket operasional siaga darurat bencana	98%	218.232.20,	
	Pemulihan dini kedaruratan	BPBD Kab. Probolinggo	Perbaikan Darurat Bencana	100%	127.000,000	Pemulihan dini kedaruratan	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket perlengkapan darurat bencanaDini Kedaruratan	97%	123.250.000	
	Managemen Logistik dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	terbentuknya Gudang Logistik PB	100%	106.480.000	terbentuknya Gudang Logistik PB	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket aplikasi managemen gudang logistik	99%	106.235.000,00	
	Penunjang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)	BPBD Kab. Probolinggo	Terpenuhinya Sarana Pendukung PUSDALOPS	100%	441.600,000	Penunjang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)	BPBD Kab. Probolinggo	1 paket peralatan komunikasi dan 1 paket peralatan rumah tangga	99%	437.341.000,00	

## 2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.3

### Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Probolinggo

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	USULAN	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Kab. Probolinggo		
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		46.800.000	
	- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS		145.600.000	
	- Penyedia Jasa Sarana dan Prasarana Kantor		413.005.000	
	- Penyedia Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		303.800.000	
			<b>909.205.000</b>	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Kab. Probolinggo		
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		194.790.000	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		338.830.000	
			<b>533.620.000</b>	

3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Kab. Probolinggo		
	- Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur SKPD		171.690.000	
			<b>171.690.000</b>	
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</b>	Kab. Probolinggo		
	<b>CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		34.700.000	
	- Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD		39.660.000	
	- Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		14.185.000	
			<b>88.545.000</b>	
5	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>	Kab. Probolinggo		
	- Aktivasi Relawan BPBD		75.000.000	
	- Gladhi Posko Banjir dan Longsor		50.000.000	
	- Penunjang Kegiatan Apel Siaga		50.000.000	
	- Bimtek Pencegahan Dini ( Mitigasi ) dan Penanggulangan Resiko Bencana ( PRB)		150.000.000	
	- Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana		350.000.000	
	- Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat		100.000.000	
	- Koordinasi dan Sinkornisasi Menuju Kabupaten Probolinggo Tangguh Bencana		100.000.000	
			<b>875.000.000</b>	
6	<b>PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>	Kab. Probolinggo		
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat		172.895.000	
	- Penanganan Siaga Darurat Bencana		118.880.000	

	- Pemulihan Dini Kedaruratan		130.165.000	
	- Penunjang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana ( PUSDALOPS )		454.200.000	
	- Pelatihan TRC PB		75.025.000	
			<b>951.165.000</b>	
7	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	Kab. Probolinggo		
	- Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana		75.000.000	
	- Aktivasi Masyarakat Pasca Bencana		125.000.000	
	- Sosialisasi Aplikasi Pengkajian dan Kebutuhan Pasca Bencana		100.000.000	
	- Jaringan Air Bersih di Daerah Rawan Kekeringan		170.775.000	
			<b>470.775.000</b>	
			<b>4.000.000.000</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI**

Dari kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dari tugas pokok dan fungsi BPBD

1. Persentase masyarakat siaga bencana,
2. Persentase tim penanggulangan bencana yang terdidik
3. Persentase tersedianya sarpras penanggulangan bencana.

Prioritas yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana adalah :

1. Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan /terpadu;
4. Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo.

Adapun rumusan **tujuan** di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur;
2. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;
3. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal;
4. Mewujudkan kapasitas perencanaan dalam pemulihan yang meliputi tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.



Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 adalah:

1. Meningkatnya kerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase SOP yang diterapkan,
- b) Persentase SPM yang diterapkan,
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanggulangan bencana.

2. Tersedianya sarana prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana,
- b) Persentase jumlah peralatan peringatan dini.

3. Meningkatnya Pengetahuan Kelurahan/Desa siaga bencana

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Terbentuknya masyarakat sadar bencana.
- b) Persentase jumlah korban yang mendapat bantuan

4. Meningkatnya Tim penanggulangan bencana terdidik

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik
- b) Persentase pelatihan penanggulangan bencana

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

➤ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

1. Belum adanya keseragaman antara penyelenggara penanggulangan bencana mengenai type BPBD secara nasional;
2. Belum adanya regulasi yang jelas tentang pembentukan BPBD karena belum tertulis tertuang bahkan tersirat di peraturan kementerian dan lembaga terkait secara nasional;

3. Penanganan penanggulangan bencana rata-rata hanya secara sporadis karena belum semua BPBD mempunyai dasar hukum rencana penanggulangan bencana beserta turunannya (Protap, SOP, dll);
4. Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai skala prioritas;
5. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang;
6. Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta membangun sistem peringatan dini masih kurang;
7. Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2018**  
**Kabupaten Probolinggo**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
		Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>782.100.000</b>				<b>909.205.000</b>
	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	8 Tenaga Honorer	BPBD Kab. Probolinggo	100%	137.600.000	DAU		100%	46.800.000
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	14 Orang Pengelola Keuangan dan Asset	BPBD Kab. Probolinggo	100%	46.700.000	PAD		100%	145.600.000
	Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor	1 Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Kegiatan Rakomas Kebencanaan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	312.310.000	DAU		100%	413.005.000

	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	4 Paket Penyediaan Jasa Telepon, Internet, Listrik dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	BPBD Kab. Probolinggo	100%	285.490.000	DAU		100%	303.400.000
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>				<b>461.835,000</b>				<b>533.620.000</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur	1 Paket Jasa Service dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Kabupaten Probolinggo	100%	354.410.000	DAU		100%	194.790.000
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	6 Paket Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Kab. Probolinggo	100%	107.425.000	DAU		100%	338.830.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>30.000.000</b>				<b>171.690.000</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	1 Paket Bintek Pengelolaan Keuangan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	30.000.000	PAD		100%	171.690.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>				<b>61.925.0000</b>				<b>88.545.000</b>

	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tenaga Ahli Akuntansi	BPBD Kab. Probolinggo	100%	31.700.000	PAD		100	34.700.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	5 Dokumen Perencana dan Laporan Kinerja	BPBD Kab. Probolinggo	100%	17.000.000	PAD		100%	39.660.000
	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket Laporan BMD dan Laporan Persediaan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	13.225.000	PAD		100%	14.185.000
	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>				<b>1.365.301.000</b>				<b>875.000.000</b>
	Mitigasi dan Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana	1 paket publikasi informasi daerah rawan bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	131.235.000	PAD		100%	350.000.000
	Aktivasi Relawan BPBD	8 Kali aktivasi relawan BPBD	BPBD Kab. Probolinggo	100%	95.845.000	PAD		100%	75.000.000
	Kesiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	5 Kali Pelaksanaan Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	84.925.000	PAD		100%	100.000.000
	Bimtek Pencegahan Dini (Mitigasi) dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	1 Kali Pelaksanaan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	-	PAD		100%	150.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	10 kali rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	68.500.000	DAU	100%	100.000.000
Penyusunan Rencana Kontinjensi	1 paket dokumen rencana kontinjensi tanah longsor	BPBD Kab. Probolinggo	100%	213.306.000	DAU	100%	
Gelar Relawan	1 Kali Pelaksanaan Gelar Relawan Penanggulangan Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	410.475.000	DAU	100%	
Gladi Posko Banjir dan Longsor	1 Kali Pelaksanaan Gladi Posko	BPBD Kab. Probolinggo		-	DAU	100%-	50.000.000
Pengembangan informasi pencegahan dini	1 Paket	BPBD Kab. Probolinggo	100%-	233.110.000	-	100%	
Penunjang kegiatan apel siaga kebencanaan	2 Kali	BPBD Kab. Probolinggo	100%-	127.905.000	-	100%	50.000.000
<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>				<b>14.246.620.000</b>			<b>470.775.000</b>
Aktivasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis masyarakat	1 Paket Kerja Bakti Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	78.930.000	PAD	100%	125.000.000

	Pembuatan Sumur Bor di Wilayah bencana kekeringan	1 Paket Rehabilitasi Pembuatan Sumur Bor di Wilayah Kekeringan	BPBD Kab. Probolinggo	100%	167.690.000	DAU		100%	170.775.000
	Sosialisasi Aplikasi Pengkajian dan Kebutuhan Pasca Bencana	Perhitungan dan kebutuhan Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo			DAU		100%	100.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	3 Kali Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pasca Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	-	PAD		-	75.000.000
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari BNPB	1 Tahun	BPBD Kab. Probolinggo	100%	14.000.000.000	-			
	<b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>				<b>1.041.175.000</b>				<b>951.165.000</b>
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat	1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	78.760.000	DAU		100%	172.895.000
	Penanganan Siaga darurat bencana alam (banjir, longsor, kekeringan, kebakaran angin putting beliung)	1 Paket Penanganan Siaga Darurat Bencana	BPBD Kab. Probolinggo	100%	221.635.000	DAU		100%	118.880.000
	Pemulihan dini kedaruratan	1 Paket Pengadaan Sembako dalam	BPBD Kab.	100%	127.000.000	PAD		100%	130.165.000

		Pemulihan Dini Kedaruratan	Probolinggo						
	Penunjang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS)	1 Paket Peralatan Komunikasi dan 1 Paket Peralatan Rumah Tangga Pusdalops dan Pemberitaan Pusdalops	BPBD Kab. Probolinggo	100%	441.600.000	DAU		100%	454.200.000
	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) PB BPBD	1 Kali	BPBD Kab. Probolinggo	100%-	65.700.000	-		100%	75.025.000
	Managemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	1 Paket	BPBD Kab. Probolinggo	- 100%	106.480.000	-		100%	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari Renja tahun 2017 dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018. Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**